

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang berbeda dari daerah, Dalam konteks ini kepala desa mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada elemen lain untuk mencegah penyalahgunaan dana desa tersebut. Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi telah sejalan dengan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksnaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Desa Gumirih telah memenuhi kriteria transparan dan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/walikota yang telah dianggarkan guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Dana Desa, Kepala Desa.



Abstract

This research was conducted to determine the Policy of the Gumirih Village Government, Singojuruh District, Banyuwangi Regency in Preventing Village Fund Misuse. The type of research conducted in this research is empirical research with a qualitative approach, namely legal research methods that function to see law in a real sense and examine how law works in society. The village is the smallest government entity that is different from the region. In this context the village head has greater power than other elements to prevent misuse of village funds. The policy of the Gumirih Village Government, Singojuruh District, Banyuwangi Regency is in line with the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages of development to the community and the Government of Banyuwangi Regency. Gumirih Village has fulfilled the criteria of being transparent and responsible, which means it can be known by the whole community. Implementation of Village Fund activities is guided by technical guidelines set by the Regent/Mayor which have been budgeted to finance community development and empowerment as outlined in the village government work plan.

Keywords: Government Policy, Village Fund, Village Head.

